



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUGENG PURNOMO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 497699

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/213 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.664 m2/1.664 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.460.000

1. MOTOR, SUZUKI SPM SOLO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 460.000
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO 004 1,5E MT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 38.485.242



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 587.045.242

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 587.045.242

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.